

## BPK SULTRA EDUKASI GEN Z TENTANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA



Sumber berita: <https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/01/09/BPK-GenZ.jpeg.webp>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar acara berjudul “BPK Mengajar Goes to School” dengan mengangkat tema “BPK Maju, BPK Terdepan”. Kegiatan ini salah satu rangkaian memeriahkan HUT ke-78 BPK RI dengan tujuan mengedukasi generasi muda atau Gen Z tentang pentingnya pemeriksaan dan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dan daerah.

Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Sultra, Agus Adi Priyanto, di Kendari, Kamis, mengharapkan para siswa dan siswi dapat terus belajar dan mengasah ilmu yang dimiliki agar ke depan bisa mengambil bagian penting dalam perbaikan bangsa, baik sebagai insan BPK, pegawai negara lainnya, maupun masyarakat pada umumnya. Ia mengatakan, kegiatan yang diikuti 80 pelajar itu bertujuan memperkenalkan peran dan fungsi BPK, khususnya di Sultra dengan harapan kalangan pelajar dapat memahami pentingnya peran BPK dalam memeriksa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran keuangan negara dan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juga diharapkan dapat menumbuhkan minat serta ketertarikan para pelajar dalam bidang pemeriksaan keuangan, sehingga mendorong minat baca dan literasi keuangan serta meningkatkan kualitas SDM. Kegiatan yang melibatkan interaksi antara BPK serta siswa dan guru ini disambut antusias, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa terkait peran BPK.

Kegiatan ini dikemas dalam berbagai sesi, seperti sesi perkenalan dan sambutan, sesi pemberian materi edukasi mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah, sesi diskusi maupun sesi games berhadiah untuk menguji pengetahuan para siswa. Pembicara lain dari "BPK mengajar" adalah Kepala Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Sultra Roslynda, Restu Nur Rasyiidah Ihwan, Niyoano Fortunato Auriol Wullur, Angga Kiryaditama Putra, dan Alica Novia Syahriadi Noor.

Kepala SMA Negeri 1 Kendari Ruslan mengapresiasi penunjukan SMA Negeri 1 Kendari sebagai tempat pelaksanaan kegiatan "BPK Mengajar" di awal tahun 2025. "Keluarga besar SMU 1 Kendari menyambut baik kegiatan 'BPK Mengajar' karena menambah pengetahuan dan wawasan siswa dan siswi. Melalui kegiatan ini mereka mengetahui keberadaan BPK " kata Ruslan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/489906/bpk-sultra-edukasi-gen-z-tentang-pemeriksaan-keuangan-negara>, "BPK Sultra Edukasi Gen Z tentang Pemeriksaan Keuangan Negara", 9 Januari 2025
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2025/01/13/bpk-sultra-edukasi-siswa-smn-1-kendari/>, "BPK Sultra Edukasi Siswa SMAN 1 Kendari", 13 Januari 2025

### **Catatan:**

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - a. Pasal 1:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
  - (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- b. Pasal 3 menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
  - c. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  - b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.